

## **ABSTRACT**

*This research examines the impact of criminal sanctions on environmental violations by corporations under Article 101 of Law Number 32 Year 2009 concerning Environmental Protection and Management. The background of the study highlights that despite the sanctions imposed for environmental violations appearing relatively lenient, the impacts on the environment and ecosystems are substantial. The main objective of this research is to evaluate the effectiveness of criminal sanctions under Article 101 of the Environmental Protection and Management Law based on the principles of legislative drafting.*

*This study employs a normative legal research approach by analyzing Article 101 of the Environmental Protection and Management Law and relevant legal principles, such as the principle of clarity of purpose and utility and effectiveness. The analysis reveals that the implementation of Article 101 may not fully meet the standard of the clarity of purpose principle, potentially reducing its effectiveness in providing clear guidance to businesses and the general public.*

*Based on these findings, it is recommended that there be an evaluation of the criminal sanctions imposed to ensure that they fulfill the principles of efficiency and effectiveness. This can be done by revising the PPLH Law or by making derivative regulations to strengthen and clarify criminal sanctions in Article 101.*

*Keywords: criminal sanctions, Article 101 Environmental Protection and Management Law, legal principles, environment*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji dampak sanksi pidana terhadap pelanggaran lingkungan oleh korporasi berdasarkan Pasal 101 UU PPLH Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Latar belakang penelitian menyoroti bahwa meskipun sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran lingkungan terlihat cukup ringan, dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan ekosistem sangat besar. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi keefektifan sanksi pidana Pasal 101 UU PPLH berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap Pasal 101 UU PPLH serta asas-asas hukum yang relevan, seperti asas kejelasan tujuan dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi Pasal 101 UU PPLH mungkin belum sepenuhnya memenuhi standar asas kejelasan tujuan, yang berpotensi mengurangi efektivitasnya dalam memberikan panduan yang tegas bagi para pelaku usaha dan masyarakat umum.

Berdasarkan temuan ini, disarankan perlu adanya evaluasi terhadap sanksi pidana yang diberlakukan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Dapat dilakukan dengan melakukan revisi UU PPLH atau dengan membuat aturan turunan untuk mempertegas dan memperjelas sanksi pidana di Pasal 101 UU PPLH.

Kata kunci: sanksi pidana, Pasal 101 UU PPLH UU PPLH, asas-asas hukum, lingkungan hidup